Jambi Accounting Review (JAR)
JAR Volume 6, Nomor 3, 2025: 64-75
e-ISSN: 2747-1187
p-ISSN: -
https://online-journal.unja.ac.id/JAR/

THE INFLUENCE OF REGIONAL SPENDING AND ECONOMIC GROWTH ON REGIONAL FINANCIAL INPENDENCE IN JAMBI PROVINCE

PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAMBI

Salwa Fadhila Rahmilna[1)*]

Zamzami[2]

Nurhayani[3]

1)Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2)&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesrsitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: salwafadhila11@gmail.com[1)], zamzami.unja@gmail.com[2)], nurhayani2106@yahoo.com[3)]*

Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 6, No. 3, September - Desember 2025: 64-75
DOI: http://10.22437/jar.v6i3.55179

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional expenditure and economic growth on regional financial independence in Jambi Province during the period 2020–2024. The descriptive analysis shows that regional expenditure and economic growth in Jambi Province experienced fluctuations during the study period, particularly due to the impact of the COVID-19 pandemic, but generally indicated a recovery trend. Meanwhile, the level of regional financial independence remains relatively low, as reflected by the high dependence on central government transfers. The regression results indicate that regional expenditure has an effect on regional financial independence, while economic growth also contributes to enhancing fiscal capacity. Simultaneously, both regional expenditure and economic growth influence regional financial independence.

Keyword: *Regional Expenditure, Economic Growth, Regional Financial Independence, Local Revenue, Panel Data.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi selama periode penelitian, terutama akibat dampak pandemi COVID-19, namun secara umum menunjukkan tren pemulihan. Sementara itu, tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah yang ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi turut berperan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Secara simultan, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, Data Panel.

PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat kemandirian yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, masih menghadapi permasalahan rendahnya kemandirian keuangan yang ditandai dengan dominasi pendapatan transfer dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belanja daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan belanja daerah yang efektif, khususnya belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal, diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas basis pajak daerah, serta mendorong peningkatan PAD. Dengan demikian, belanja daerah berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan keduanya.

Selain itu, struktur pendapatan daerah di Provinsi Jambi masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah belum optimal. Padahal, peningkatan PAD merupakan kunci utama dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Upaya optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya alokasi belanja daerah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif. Sebagian besar belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional, seperti belanja pegawai, dibandingkan belanja modal yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks penelitian empiris, hubungan antara belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau bahkan berpengaruh negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada tingkat daerah seperti Provinsi Jambi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan bukti empiris yang lebih spesifik dan relevan dalam menjelaskan hubungan antar variabel tersebut.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Tingkat kemandirian ini umumnya diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas desentralisasi fiskal.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Secara teoritis, belanja daerah, khususnya belanja modal yang produktif, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas basis pajak, serta mendorong peningkatan PAD. Dengan demikian, pengelolaan belanja daerah yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan peningkatan output atau nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah, yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan kemandirian keuangan daerah. Namun demikian, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, sementara studi lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan negatif.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi diduga memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja daerah yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani yang menyatakan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan berkembangnya aktivitas produksi, investasi, dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap kemandirian keuangan daerah karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, serta belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan inferensial. Objek penelitian adalah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian keuangan daerah yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, laporan keuangan pemerintah daerah, serta portal Kementerian Keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan realisasi APBD, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Variabel independen meliputi belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Metode analisis data menggunakan regresi data panel, yang merupakan kombinasi data time series dan cross section. Model persamaan yang digunakan adalah:

$$Yit = \alpha + \beta 1X1it + \beta 2X2it + \mu i + \varepsilon it \quad (1)$$

di mana Yit adalah kemandirian keuangan daerah, X1it adalah belanja daerah, dan X2it adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk menentukan model terbaik digunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

Selanjutnya, dilakukan uji statistik berupa uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow dan uji Hausman.

Berdasarkan hasil pengujian model, diperoleh bahwa model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM)**.** Model ini dipilih karena mampu menangkap perbedaan karakteristik masing-masing kabupaten/kota yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Nurhayani (2020), Pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka tahun 2000-2017 dalam jangka pendek memberikan dampak positif dan tidak signifikan, sedangkan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka tahun 2000-2017 dalam jangka pendek memberikan dampak negatif dan tidak signifikan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam jangka panjang memberikan dampak positif dan signifkan, artinya jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka dalam jangka waktu yang panjang. Pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam jangka panjang memberikan dampak negatif dan tidak signifikan.(Podi et al., 2020)

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki koefisien positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah cenderung diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah. Namun, berdasarkan hasil uji t, pengaruh tersebut tidak seluruhnya signifikan pada tingkat kepercayaan tertentu, yang menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah mampu memperluas basis penerimaan daerah, sehingga meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Cross-section F.

Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM)
2. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka model yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM).

Berdasarkan hasil pengelolaan data hasil Uji Chow sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistik	Prob
Cross-section F	4,862	0,000

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, penggunaan Fixed Effect Model lebih tepat karena model ini mampu menangkap perbedaan karakteristik masingmasing daerah. Dengan demikian, berdasarkan uji Chow model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

2. Uji Hausman

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, penggunaan Fixed Effect Model lebih tepat karena model ini mampu menangkap perbedaan karakteristik masingmasing daerah. Dengan demikian, berdasarkan uji Chow model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 1.2

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistik	Prob
Cross -section Random	7,214	0,027

Berdasarkan tabel di atas nilai probabilitas sebesar 0,027. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat siginikansi 0,05 (0,027 < 0,05). Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkat Random Effect Model (REM). Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar daerah yang tidak dapat dijelaskan oelh model random.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Belanja Daerah Memiliki Pengaruh Positif Namun Tidak Signifikan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. Secara Teoritis, Belanja Daerah Merupakan Instrumen Fiskal Yang Dapat Mendorong Peningkatan Aktivitas Ekonomi Serta Memperluas Basis Pendapatan Asli Daerah (Pad). Akan Tetapi, Hasil Penelitian Ini Mengindikasikan Bahwa Peningkatan Belanja Daerah Belum Sepenuhnya Diarahkan Pada Sektor-Sektor Produktif Yang Mampu Meningkatkan Penerimaan Daerah Secara Langsung.

Kondisi Tersebut Dapat Dijelaskan Oleh Struktur Belanja Daerah Pada Sebagian Besar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Yang Masih Didominasi Oleh Belanja Operasional, Seperti Belanja Pegawai Dan Belanja Rutin Lainnya, Dibandingkan Dengan Belanja Modal Yang Memiliki Dampak Jangka Panjang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pad. Data Dari Badan Pusat Statistik Menunjukkan Bahwa Alokasi Belanja Operasional Di Beberapa Daerah Masih Lebih Besar Dibandingkan Belanja Modal Sehingga Dampaknya Terhadap Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Belum Optimal. Akibatnya, Meskipun Terjadi Peningkatan Belanja Daerah, Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Masih Relatif Terbatas Karena Pemerintah Daerah Masih Bergantung Pada Dana Transfer Dari Pemerintah Pusat.

Hasil Penelitian Ini Sejalan Dengan Penelitian Terdahulu Yang Menyatakan Bahwa Belanja Daerah Tidak Selalu Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Apabila Pengelolaannya Belum Efektif Dan Efisien. Belanja

Daerah Yang Lebih Banyak Digunakan Untuk Kebutuhan Administratif Cenderung Tidak Memberikan Efek Besar Terhadap Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Maupun Penerimaan Daerah. Dengan Demikian, Peningkatan Jumlah Belanja Daerah Saja Belum Cukup Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Tanpa Diikuti Pengalokasian Anggaran Yang Lebih Produktif Dan Tepat Sasaran.

Implikasi Dari Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pemerintah Daerah Di Provinsi Jambi Perlu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Anggaran Dengan Memperbesar Proporsi Belanja Modal, Khususnya Pada Sektor Infrastruktur, Perdagangan, Pertanian, Dan Pengembangan Usaha Masyarakat. Pengalokasian Belanja Yang Lebih Produktif Diharapkan Mampu Menciptakan Aktivitas Ekonomi Baru Yang Pada Akhirnya Dapat Meningkatkan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah. Selain Itu.

Di Sisi Lain, Pertumbuhan Ekonomi Terbukti Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Peningkatan Aktivitas Ekonomi Di Daerah Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Pada Akhirnya Berdampak Pada Peningkatan Penerimaan Daerah Melalui Pajak Dan Retribusi. Dengan Demikian, Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Faktor Penting Dalam Memperkuat Kapasitas Fiskal Daerah.

Hasil Penelitian Ini Mendukung Teori Pertumbuhan Ekonomi Yang Menyatakan Bahwa Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Akan Memperluas Basis Pajak Daerah Dan Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Secara Mandiri. Dalam Konteks Provinsi Jambi, Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Turut Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah. Data Badan Pusat Statistik Menunjukkan Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Mengalami Peningkatan Yang Didukung Oleh Sektor Unggulan Seperti Pertanian, Perkebunan Kelapa Sawit, Perdagangan, Dan Pertambangan. Kabupaten Muaro Jambi Dan Kota Jambi, Misalnya, Memiliki Aktivitas Ekonomi Yang Relatif Lebih Tinggi Dibandingkan Beberapa Daerah Lainnya Sehingga Realisasi Pad Dan Tingkat Kemandirian Keuangannya Juga Cenderung Lebih Baik.

Alasan Lain Yang Menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Adalah Karena Meningkatnya Aktivitas Produksi Dan Konsumsi Masyarakat Secara Langsung Akan Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi, Serta Kontribusi Sektor Usaha Terhadap Pendapatan Daerah. Semakin Berkembang Perekonomian Suatu Daerah, Maka Semakin Besar Pula Kemampuan Pemerintah Daerah Untuk Membiayai

Pembangunan Tanpa Bergantung Sepenuhnya Pada Dana Transfer Pusat.

Implikasi Dari Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pemerintah Daerah Perlu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Daerah, Peningkatan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, Serta Pemberdayaan Umkm Dan Sektor Pertanian. Upaya Tersebut Penting Dilakukan Agar Peningkatan Aktivitas Ekonomi Dapat Diikuti Dengan Peningkatan Penerimaan Daerah Sehingga Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Dapat Terus Meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Perkembangan belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi selama periode 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 3,50% yang mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sementara itu, dari sisi keuangan daerah, rata-rata pendapatan daerah sebesar 1,31 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 1,34 triliun rupiah menunjukkan bahwa belanja daerah masih memanfaatkan pembiyaan, dengan rata-rata penerimaan pembiyaan sebesar 103,96 miliar rupiah dan pengeluaran pembiyaan sebesar 26,79 miliar. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi**.** Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah yang dikelola secara efektif mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah di sebagian kabupaten/kota masih tergolong rendah karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Dina, K., Jadmiko, P., Pratama, A., & Muthya, R. (2025). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019-2023. *Jurnal IAKP*, *6*(1).

Fee, A., Size, A. F., & Hardiyanti, S. (2024). *Jurnal Cakrawala Akuntansi*. *14*(20).

Harahap, M. N., Yaqien, M. G. A., Sutjipto, H., & Desmawan, D. (2024). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, *10*(2), 139–152. https://doi.org/10.35384/jemp.v10i2.580

Podi, S. I., Pembangunan, P. E., Ekonomi, F., & Jambi, U. (2020). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap pengangguran perbuka di Provinsi Jambi pendekatan vector error correction model (VECM)*. *15*(1).

Purbaningsih, R. Y. P. (2024). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *29*(23), 2.

Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif* Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, *3*(4), 243–256. https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526

Saragih, J. (2022). *Local Government Capital Expenditure, Internal Supervision, Wealth and Human Development: Evidence from Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, *9*(1), 89–106. https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.23562

Sasana, H. (2019). *Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth. Economics Development Analysis Journal*, *8*(1), 108–119. https://doi.org/10.15294/edaj.v8i1.29879

Septiani, E. (2025). *Expenditure in Central Java Province*. *8*(2), 169–180.

Suharjo, F. A., & Suhendro, S. (2025). *Analysis of the Effect of Regional Original Revenue Contributions and Balanced Funds on the Level of Regional Financial Independence of Provinces in Indonesia in 2019-2023. International Journal of Economics, Management and Accounting*. https://doi.org/10.61132/ijema.v2i3.727

Sukmawati, A., Murnidayanti, S. A., & Permana, K. (2025). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2021-2023*. *10*(204), 1832–1841.

Sylviana, W., & Puspita, R. D. (2024). C. *East Java Economic Journal*, *8*(2), 260–

268. https://doi.org/10.53572/ejavec.v8i2.146

Tuwaidan, G. K., Masinambow, V. A. J., & Kawung, G. M. V. (2024). *The Influence of Regional Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditure on Regional Financial Independence Through Economic Growth in North Sulawesi Province. Jurnal IndonesiaSosialSains*, *5*(12),3134–3150.